

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Asia Timur terkenal dengan negara-negaranya yang sangat pesat dalam kemajuan ekonomi dan teknologi. Sejak zaman dahulu pun negara-negara di kawasan ini telah memiliki hubungan yang relatif dekat, antara Cina, Jepang, dan Korea. Ketika zaman mulai memasuki masa post-modernisme, setelah melewati perjuangan panjang dari peristiwa Perang Korea, Korea pun mulai bangkit berkembang, terutama Korea Selatan yang kini terkenal akan ragam budaya dan eksistensi di kemajuannya dalam perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi di dunia.

Korea Selatan yang secara geografis memiliki posisi berdekatan dengan Jepang, tidak bisa mengabaikan perubahan yang ada pada Jepang, karena dapat memiliki pengaruh yang bisa langsung dirasakan oleh Korea Selatan. Ditambah kedua negara ini memiliki kesamaan dalam banyak aspek, selain karena berada dalam satu Kawasan yang sama yaitu di Kawasan Asia Timur dan berada di bawah naungan yang sama yaitu Amerika Serikat, keduanya memiliki asal karakteristik masyarakat, tradisi, nenek moyang sama, sehingga membuat tradisi dan nilai-nilai kepercayaan mereka pun sama, seperti masih dianutnya nilai-nilai Konfusianisme. Dalam hal ekonomi pun, dilihat dari posisi tingkat GDP Korea Selatan dan Jepang pada 2010 terpaut tak terlalu jauh, sehingga dapat di tunjukkan bahwa kedua negara memiliki kedekatan ekonomi (Wang, 2014 dalam Haq, R., 2016).

Dalam perkembangan Korea Selatan, kolonialisme Jepang di masa Perang Dunia II menjadi salah satu yang mewarnai sejarahnya. Korea yang baru memasuki zaman modern pun mengalami masa kependudukan Jepang. Korea Selatan pernah menjadi jajahan Jepang, di mana Jepang dikenal sangat tegas dalam memerintah yang kemudian menimbulkan kesengsaraan

terhadap bangsa Korea. Korea Selatan pun saat itu masih bersatu dengan Korea Utara, bersama berada di bawah jajahan Jepang pada kisaran tahun 1910-1945.

Salah satu persoalan yang muncul di Asia Timur adalah persoalan antara Korea Selatan dan Jepang yang membuat hubungan diplomatik di antara kedua negara masih belum benar-benar membaik. Sejarah menunjukkan bagaimana dinamika hubungan di antara Korea Selatan dan Jepang ini muncul sudah sejak tahun 1500-an di saat Semenanjung Korea ingin dikuasai oleh Jepang untuk memperluas wilayahnya. Ketika Perang Dunia II berlangsung, setelah menang melawan Tiongkok dan Rusia, Korea dianeksasi oleh Jepang pada 1910. Korea pun dipaksa untuk melakukan asimilasi antara kebudayaan Jepang dan kebudayaan Korea dengan cara dibuatnya kebijakan-kebijakan di bawah pemerintahan Jepang (Beasley, 1991, yang dikutip Wijaya, B. S, 2018).

Selain itu menurut Fiqri, H. (2016) konflik semakin memanas dikarenakan Kuil Yasukuni, yang dalam sudut pandang rakyat Korea Selatan, dipandang tak lebih sebagai simbol kekejaman dan arogansi Jepang pada masa perang, mendapat kunjungan Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi. Dengan adanya kejadian itu, Korea Selatan diingatkan kembali akan peristiwa pergerakan 1 Maret 1919 di mana sekitar 2 juta Masyarakat Korea terlibat di dalamnya, kemudian ratusan ribu perempuan Korea yang pada saat itu diperlakukan dengan sangat buruk oleh tentara Jepang sejak tahun 1932, yang juga sebagian dari mereka akhirnya dibunuh. Masyarakat Korea Selatan pun semakin menganggap kunjungan tersebut sebagai simbol tidak adanya penyesalan Pemerintah Jepang atas kekejaman yang dilakukan oleh militernya di masa lalu.

Setelah bertahun-tahun tersendatnya hubungan Korea Selatan dan Jepang, pada Juni 1965 Korsel-Jepang akhirnya membuka hubungan diplomatik dengan Traktat Hubungan Dasar. Sejak adanya traktat tersebut, normalisasi hubungan dari kedua negara dimulai dan terus berjalan. Di samping itu Korea

Selatan dan Jepang juga merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, sehingga diharapkan dapat membangun kembali hubungan negara yang erat. Namun dibalik itu, masih tetap ada beberapa masalah seperti masalah *comfort woman* yang menjadi salah satu hambatan dalam hubungan Korea Selatan dengan Jepang.

Banyaknya titik perselisihan terkait masalah *comfort woman* ini dari kedua belah pihak untuk mencapai resolusi semakin merenggangkan hubungan keduanya. Di mana jika dilihat lebih jauh, masalah ini sangat mengakar dalam kesadaran budaya, politik, dan identitas Korea Selatan yang kemudian mencerminkan kompleksitas masalah ini dan tantangan diplomatiknya yang tidak konvensional (Kuki, S., 2013). Banyak mantan *comfort woman* yang kecewa karena Jepang belum mengeluarkan permintaan maaf atau kompensasi resmi yang jelas dan tegas, dan dianggap tidak tulus. Para korban mencari permintaan maaf resmi yang mengakui agresi perang dan dominasi kolonial Jepang.

Konflik perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan merupakan ambisi dua negara Asia Timur ini dalam menunjukkan kepada dunia internasional tentang siapa yang lebih unggul. Perang dagang ini dipengaruhi oleh sejarah panjang antara kedua negara ketika Jepang menjadikan Korea Selatan sebagai negara koloni sekaligus melegitimasi imperialisme dan kolonialisme. Perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang dimulai pada 1 Juli 2019. Kasus ini dilatarbelakangi oleh keputusan Jepang dalam ekspor beberapa komoditas ke Korea Selatan, khususnya beberapa jenis bahan kimia industri. Alasan Jepang ini karena Korea Selatan meminta negara ini untuk membayar kompensasi terhadap tenaga kerja paksa ketika Perang Dunia II.

Setelah peristiwa Perang Dingin berakhir, dunia internasional cenderung bergerak menuju ke arah regionalisme, dan negara-negara yang masih cenderung muda atau baru atau lebih tepatnya masih berada pada tahap pertumbuhan ekonomi

yang terpacu pada sektor ekspor, seperti Korea Selatan, merasa adanya tekanan dan lebih sulit untuk bersaing. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi dalam ekspor Korea Selatan sangat bergantung pada perdagangan dengan negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Uni-Eropa. Hal ini kerap menimbulkan perselisihan, karena adanya kebutuhan untuk bergantung pada negara lain yang tinggi. Semakin berkembangnya keadaan perekonomian ke arah industri teknologi yang intensif, Korea Selatan merasa adanya kebutuhan untuk memperluas perdagangannya dengan negara-negara berkembang dan negara-negara di bagian Eropa Timur demi memberikan kontribusi yang lebih terhadap perkembangan ekonomi global.

Dimasukinya era modern membuat perkembangan dunia hiburan juga semakin berkembang, seperti yang dikutip dari Kusumastuty, A (2014) bahwa di mana salah satu dasar normalisasi antara Korea Selatan dan Jepang yang tertuang dalam *Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea*, ketika kedua negara telah menyepakati bahwa dalam rangka melakukan normalisasi hubungan, maka Korea Selatan akan diberikan kompensasi oleh Jepang dalam bentuk kerja sama ekonomi yang diharapkan dapat memicu adanya perkembangan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketika Korea Selatan mencapai kemajuan dalam demokrasi pada kisaran tahun 1990-an setelah keberhasilan ekonomi yang pesat pada tahun 1970-an dan 1980-an, para pemimpinnya meluncurkan inisiatif berani untuk meningkatkan hubungannya dengan Jepang. Landasan untuk memajukan hubungan baru telah dibuktikan dan ditawarkan dengan dilakukannya kunjungan oleh Presiden Kim Dae Jung ke Tokyo pada tahun 1998. Dalam sebuah pernyataan bersama, Kim dan Perdana Menteri Keijo Obuchi mengumumkan terbentuknya inisiatif untuk membangun "*Kemitraan Jepang-Korea Baru menuju abad ke-21.*" Presiden Korea dengan berani mengatakan untuk mengesampingkan perbedaan masa lalu dan mencari hubungan

yang berorientasi masa depan, Kim tidak meminta permintaan maaf atas kolonisasi Jepang di Korea.

Sebaliknya, ia memuji upaya Jepang pasca perang untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di masyarakat internasional melalui Konstitusi Perdamaian dan bantuan pembangunan luar negeri. Pernyataan memaafkan Kim sebagian besar dihargai oleh rekannya dari Jepang, yang melihatnya sebagai upaya untuk menutup beban sejarah lama antara kedua negara. KTT itu berkomitmen Jepang dan Korea Selatan untuk meletakkan masalah masa lalu di belakang mereka dan untuk membangun hubungan konstruktif berdasarkan nilai-nilai dasar bersama seperti demokrasi liberal dan ekonomi pasar.

Upaya rekonsiliasi oleh Kim Dae Jung dengan Jepang layak mendapat pujian sebagai pencapaian diplomatik yang penting. Di mana kebanyakan orang Korea masih menyimpan dendam terhadap pendudukan Jepang, dan nasionalisme Korea sebagian besar ditentukan oleh sikap anti-Jepang. Namun, Kim berpendapat bahwa kerja sama dalam berbagi demokrasi antara dua ekonomi paling maju tidak boleh terhalang oleh emosi dari masa lalu.

Setelah mengetahui sejarah dan perjalanan Panjang yang telah ditempuh oleh Korea Selatan, dapat diketahui bahwa Korea Selatan adalah pihak korban dari penjajahan Jepang sejak tahun 1910 hingga tahun 1945. Sesaat setelah usainya Perang Dunia II, Korea Selatan yang baru merasa terlepas dari jajahan Jepang, memasuki peristiwa berat baru, yaitu menjadi bidak dalam Perang Dingin antara kubu Liberal dan Komunis.

Alhasil Korea Selatan mengalami peristiwa Perang Saudara dengan Korea bagian utara yang menganut Komunis yang terpicu oleh peristiwa tersebut. Korea Selatan menjadi sangat lemah akibat terkurasnya sumber daya manusia dan sumber daya alam bahkan setelah terpisah dengan Korea Utara, masih berusaha untuk bangkit dengan segala cara bahkan pemerintah meminta bantuan rakyatnya dengan menjual tiket demi upaya pencegahan kemiskinan negara. Namun, perekonomian Korea Selatan masih tak berubah banyak. Di tengah masih maraknya

pertikaian Liberal dan Komunis, Korea Selatan berpikir bahwa walaupun Korea Utara dan China lebih dekat, meminta bantuan secara ekonomi sangat tidak memungkinkan karena bedanya paham. Ketika Korea Selatan mulai terdesak, Korea Selatan mulai terpikirkan bahwa Jepang adalah tetangga terdekat, dan pada saat bersamaan juga berada di bawah Amerika yang berpaham Liberal.

Awalnya pemerintah sangat di tentang oleh masyarakat, mengingat bahwa Korea Selatan telah terjajah oleh Jepang dan para perempuan Korea Selatan yang telah diperlakukan dengan sangat buruk oleh para tentara Jepang. Pemerintah Korea Selatan menimbang bahwa jika negara bergerak lebih dulu untuk mendekati Jepang, maka akan sangat berpengaruh positif di mata dunia. Hasilnya pun akan lebih baik jika meminta bantuan Jepang, karena dinilai usaha akan lebih efisien, dan juga Jepang sendiri akan tertekan oleh masyarakat dunia jika menolak permintaan Korea Selatan yang dulunya adalah korban dari kejahatan Jepang dan merupakan kewajibannya.

Korea Selatan melihat bahwa semakin berkembangnya zaman, maka pasar juga akan semakin meluas. Dalam cakupan wilayah Korea yang berada dalam Kawasan Asia Timur, membuat Korea Selatan mulai membutuhkan pasar yang lebih luas, sekaligus ingin melebarkan pengaruh budayanya kepada negara-negara tetangganya, termasuk juga Jepang. Dengan melihat banyaknya konflik dan rasa bencinya terhadap negara Jepang, tetapi karena adanya rasa urgensi mengenai Jepang yang menjadi target utama pasar bagi Korea Selatan, Korea Selatan pun memutuskan berinisiatif untuk mempererat hubungan negaranya dengan Jepang.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran dan upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam hal untuk mempererat hubungan dengan Jepang.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu *Bagaimana upaya Korea Selatan untuk mempererat hubungan bilateral dengan Jepang tahun 2010-2019?*

D. Kerangka Teori

Untuk membantu menjelaskan permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori konsep Diplomasi Publik dan Diplomasi Kebudayaan.

1. Diplomasi Publik

Diplomasi publik dimaknai sebagai suatu usaha meningkatkan mutu komunikasi yang dalam prosesnya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam negeri dan luar negeri dengan tujuan memberikan pemahaman atas negara itu sendiri, sikap, intuisi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah (J. Wang, 2006 dikutip oleh Ramadhan, F. B, 2014).

Diplomasi publik dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan yang diarahkan ke luar negeri, dapat mencakup dalam bentuk informasi seperti politik, pendidikan, dan budaya, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemerintah asing, dengan mempengaruhi warganya, di mana diplomasi publik ini semakin berkembang dalam lingkup strategi promosi dan persuasi, serta terkait erat dengan kepentingan negara sendiri (*self-interest*) dan cara memengaruhi melalui *image* negara (Szondi, G, 2009).

Frederick (1993, dikutip Szondi, G, 2008) berpendapat bahwa diplomasi publik termasuk sebagai salah satu cara penyelesaian konflik intensitas rendah, di mana cara ini dapat mengembangkan spektrum komunikasi

untuk memvisualisasikan peran komunikasi dalam urusan global. Diplomasi publik dapat disimpulkan sebagai suatu usaha dalam bentuk komunikasi suatu negara untuk mengubah pandangan pihak lain atau negara lain dengan cara-cara positif seperti melalui ilmu pengetahuan, olahraga, budaya dan seni.

Dalam penerapannya diplomasi publik tidak terlepas dari adanya kesinambungan komunikasi kebijakan luar negeri terhadap publik asing. Ciri utama dalam diplomasi publik adalah semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) akan terlibat dalam prosesnya (Hennida, 2010). *Stakeholder* yang terlibat tidak hanya Departemen Luar Negeri, tetapi juga departemen di dalam sistem pemerintahan, sektor swasta, LSM, media dan individu. Dengan porsi partisipasi yang beragam dan besar, maka penyusunan strategi komunikasi harus dikedepankan.

Diplomasi dapat dihasilkan tidak hanya melalui persuasi atau paksaan berdasarkan metode tradisional, tetapi juga melalui berbagai daya tarik. Informasi, sehingga menunjukkan perlunya diplomasi publik. Khususnya, di tengah perubahan paradigma diplomasi, suatu bangsa dapat mempengaruhi bangsa lain bukan dengan membatasi pengaruh opini publik tetapi dengan memanfaatkan opini publik sebaik-baiknya. Diplomasi publik, yang menyebarkan kebijakan, nilai, dan budaya pemerintah kepada publik asing berdasarkan *soft power* suatu bangsa, mulai mengupayakan pertukaran horizontal dan dua arah melalui diversifikasi konstituen diplomatik dan media baru. Adanya *Korean Wave (hallyu)* telah menarik perhatian dunia. Hal ini memiliki fungsi sebagai kekuatan untuk Korea Selatan. Harapan untuk potensi Korean Wave dalam domain diplomasi publik tinggi, begitu pula kekhawatiran yang terkait dengan *hallyu* tersebut.

Drama dan program pertunjukan yang diproduksi oleh media penyiaran, serta film, dan idola K-pop yang telah diperkenalkan sebagai item bisnis dengan keuntungan tinggi oleh keberadaan pihak-pihak swasta seperti stasiun penyiaran, perusahaan hiburan, produser drama dan film. Jika dan ketika

gambar Korea Selatan dikembangkan dengan maksimal, *image* Korea Selatan akan berubah berdasarkan apakah konten tersebut baik dan tidak buruk. Walaupun memiliki masalah dengan negara Jepang, tapi kekuatan *Korean Wave* ini masih cukup kuat bahkan dapat terus berkembang saat penyanyi K-pop membuat terobosan ke Eropa dan Amerika Serikat. Hasilnya adalah Korea Selatan dapat memperlihatkan diri kepada dunia internasional tak luput dari Jepang, karena Korea Selatan telah dianggap berhasil dalam mempublikasikan citranya melalui penyanyi idola K-pop, drama TV, dan film Korea.

2. Diplomasi Kebudayaan

Menurut Warsito, T (2007) Diplomasi Kebudayaan berasal dari kata diplomasi yang memiliki arti usaha yang dilakukan oleh negara-bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di lingkup internasional,. Sedangkan kebudayaan memiliki arti sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia di mana dalam lingkup pemanfaatan kesenian. Sehingga diplomasi kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan atau seni seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian. Di dalam proses berjalannya diplomasi kebudayaan, diperlukan beberapa sinkronisasi tiap aktor dalam masing-masing jalur (*track*) yang ada.

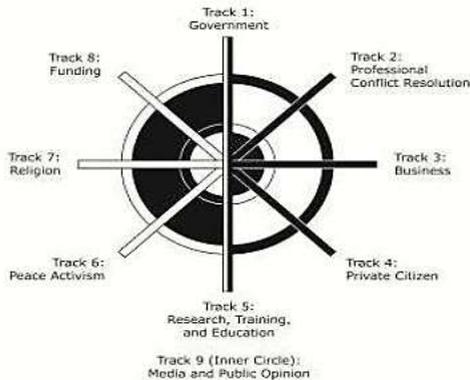
Diplomasi pada jalur satu (*track one*) dapat didefinisikan sebagai sebuah diplomasi resmi atau pemerintah, di mana komunikasi dan interaksi berada di antara pejabat pemerintah seperti Presiden, Kementerian Perdagangan, atau Kementerian Luar, yang mana diyakini tidak mampu menyelesaikan konflik intra-negara atau melindungi kerja sama internasional. Dalam

artikel Mapendere, Joseph V. Montville berpendapat bahwa pendekatan inter-personal sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah, ia menjelaskan diplomasi jalur dua (*track two*) memiliki kekuatan dibandingkan dengan diplomasi jalur satu (*track one*), di mana diplomasi jalur dua (*track two*) didefinisikan sebagai diplomasi tidak resmi yang dilakukan oleh pihak non-pemerintah.

Dalam pengembangan diplomasi jalur dua (*track two*), Dr. Louise Diamond, mengamati bahwa diplomasi jalur dua (*track two*) tidak cukup memadai untuk mencakup semua kompleksitas di bawah diplomasi tidak resmi. Menurut John W. McDonald (2002) diplomasi dapat diperluas menjadi empat bagian yang terpisah yaitu pejabat resolusi konflik, bisnis, warga negara swasta, dan media. Pada tahun 1991, diplomasi jalur dua (*track two*) meluas menjadi sembilan jalur berbeda dengan menambahkan empat jalur lain.

Dr. Diamond dan Duta Besar McDonald membedakan jejak menjadi agama, aktivisme, penelitian, pelatihan, pendidikan, dan filantropi, seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas. Masing-masing dari sembilan trek dalam diagram di atas bukan satu-satunya entitas yang beroperasi dengan sendirinya tetapi sistem yang saling berhubungan di mana masing-masing jalur (*track*) akan mempengaruhi dan mendukung upaya diplomasi, seperti dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 1.1
Diagram *Multi-track* Diplomasi



Sumber: <https://www.slideshare.net/leadershipmgtservice/what-is-multi-track-diplomacy>

Berdasarkan diagram di atas, Diplomasi *Multi-track* terdiri dari sembilan jalur (*track*), sebagai berikut:

1. *Track 1* - Pemerintah, atau Pembangunan Perdamaian melalui Diplomasi. Jalur ini merupakan diplomasi resmi, pembuatan kebijakan, dan pembangunan perdamaian sebagaimana diekspresikan melalui aspek formal dari proses pemerintahan.
2. *Track 2* - Nonpemerintah atau Pembuat Perdamaian (*Peacemaking*) melalui resolusi konflik. Jalur ini ada dalam ruang lingkup aksi non-pemerintah profesional yang berusaha menganalisis, mencegah, menyelesaikan, dan mengelola konflik internasional oleh aktor-aktor non-negara.
3. *Track 3* - Bisnis, atau *Peacemaking* melalui perdagangan. Jalur ini melalui bidang bisnis dan pengaruhnya yang aktual dan potensial terhadap pembangunan perdamaian dengan penyediaan

peluang ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, saluran komunikasi informal, dan dukungan untuk kegiatan penciptaan perdamaian lainnya.

4. *Track 4 - Citizen Private*, atau *Peacemaking* melalui keterlibatan pribadi. Ini mencakup berbagai cara agar setiap warga negara terlibat dalam kegiatan perdamaian dan pembangunan melalui diplomasi warga negara, program pertukaran, organisasi sukarela swasta, organisasi nonpemerintah, dan kelompok minat khusus.
5. *Track 5* - Penelitian, pelatihan, dan pendidikan, atau penciptaan perdamaian melalui pembelajaran. Jalur ini mencakup tiga poin terkait: penelitian, karena terhubung ke program universitas, *think tank*, dan pusat penelitian minat khusus; program pelatihan yang berupaya memberikan pelatihan keterampilan praktisi seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik, dan fasilitasi pihak ketiga; dan pendidikan, termasuk taman kanak-kanak melalui program PhD yang mencakup berbagai aspek studi global atau lintas budaya, studi perdamaian dan tatanan dunia, dan analisis konflik, manajemen, dan resolusi.
6. *Track 6* - Aktivisme, atau pembangunan perdamaian melalui advokasi. Jalur ini mencakup bidang perdamaian dan aktivisme lingkungan tentang isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, dan advokasi kelompok-kelompok berkepentingan khusus mengenai kebijakan pemerintah yang spesifik.
7. *Track 7* - Agama. Jalur ini mengkaji keyakinan dan tindakan damai dari komunitas spiritual dan agama dan gerakan berbasis moralitas seperti pasifisme, perlindungan, dan non-kekerasan.
8. *Track 8* - Pendanaan, atau pembuatan perdamaian melalui menyediakan sumber daya. Ini merujuk

pada komunitas pendanaan - yayasan dan filantropis individual yang memberikan dukungan finansial untuk banyak kegiatan yang dilakukan oleh jalur yang lain.

9. *Track 9* - Komunikasi dan Media, atau Penciptaan Perdamaian melalui Informasi. Ini adalah ranah suara rakyat: bagaimana opini publik dibentuk dan diekspresikan oleh media-cetak, film, video, radio, sistem elektronik, seni.

Sembilan *track* yang terpapar di atas sangat memungkinkan untuk digunakan dalam praktik diplomasi publik, dan dalam studi kasus Korea Selatan yang menjadi poin utama dalam diplomasi publik negara ini memaksimalkan berjalannya sebagian dari jalur (*track*) di atas.

Dilihat pada jalur 1 yaitu peran dari pemerintah yang mendukung, jalur 3 yaitu sisi pebisnis dari industri musik yang membuat dan mengembangkan budaya, jalur 4 dari lembaga non-pemerintah yang menaungi pemberdayaan keterampilan masyarakat dan masyarakat yang secara individu memiliki pengaruh terhadap tercapainya tujuan negara, jalur 5 yaitu dengan adanya penelitian, pelatihan dan Pendidikan dapat mempermudah negara dalam melakukan kontak dengan negara lain, dan jalur 9 yaitu media dan pembentuk opini publik yang bertugas menyebarkan dan membentuk citra negara pada negara lain.

Aktor industri musik seperti artis dan grup musik di sini menjadi kunci penting di mana pemerintah Korea Selatan melakukan suatu usaha-usaha untuk penciptaan sebuah persepsi mengenai negaranya terhadap negara lain terutama kepada Jepang dan menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak lagi melihat Jepang sebagai ancaman. Korea Selatan yang juga terkenal dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuannya, serta pendidikannya yang baik, dapat dijadikan salah satu cara untuk menjadi jalan berdiplomasi. Selain itu alat yang digunakan Korea Selatan adalah berupa

media massa, di mana sampai sekarang media memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Media mempunyai manfaat yang penting dalam memberikan informasi kepada publik.

Pembuktian tentang pentingnya media ini dapat dilihat dari kepentingan individu, kelompok, maupun pemerintah yang disampaikan melalui media massa baik media cetak maupun elektronik kepada masyarakat publik negara lain. Dukungan media juga digunakan pemerintah Korea Selatan dalam melakukan upaya diplomasi berupa penyebaran dalam penciptaan musik dan juga kampanye. Memanfaatkan ketenaran yang dimiliki oleh artis dan grup musiknya, pemerintah Korea Selatan mencoba memberikan inspirasi bagi masyarakat Jepang maupun dunia, serta memberikan pesan-pesan persepsi negara seperti perdamaian untuk pendengar lagunya.

E. Hipotesa

Dari rangkaian penulisan mengenai latar belakang masalah hingga kerangka teori dan konsep yang ada, maka penulis dapat menarik hipotesis bahwa :

1. Korea mempererat hubungan dengan Jepang dengan cara melakukan diplomasi publik yaitu dengan meningkatkan citra negara melalui *Korean Wave* atau *Hallyu*.
2. Melakukan diplomasi *multi-track* dengan melibatkan pemerintah, kelompok bisnis dari kelompok pemerintah dan kelompok non-pemerintah seperti dilakukannya pertukaran ahli dan pelajar, industri musik Korea Selatan, setiap individu, dan media dapat membantu menyebarkan budaya Korea.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif atau deskriptif yaitu dengan menggambarkan upaya Korea Selatan yang semakin modern dan melihat peluang untuk mempererat hubungan dengan Jepang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan adalah dengan mencari data pustaka, *library research*, yaitu dengan mengumpulkan data-data dengan mencari sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan, majalah, surat kabar, artikel dan internet.

3. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu adalah dengan menggambarkan masalah secara umum, kemudian menarik kesimpulan khusus mengenai upaya Korea Selatan mempererat hubungan bilateral dengan Jepang.

G. Sistematika Penulisan

Bab I akan terdiri dari pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang yang merupakan sumber masalah dari penelitian. Kemudian rumusan masalah sebagai fokus pembatas kajian penelitian ini. Untuk menganalisis masalah secara ilmiah, maka peneliti menggunakan landasan teori yang ada di Bab I ini. Selanjutnya adalah hipotesis terhadap penelitian ini, metode penelitian sebagai langkah operasional penelitian, tujuan penulisan, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Dalam BAB II akan dijelaskan mengenai penjelasan profil negara Korea, khususnya Korea Selatan dan juga negara

Jepang. Kemudian dijelaskan keadaan dinamika dengan sejarah yang terjadi di antara Korea Selatan dan Jepang, dan cara pandang dari Korea Selatan terhadap Jepang.

Dalam BAB III akan dijelaskan mengenai konflik yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang. Konflik-konflik tersebut akan diperinci terkait isu *comfort woman*, kasus perang dagang, dan kompetisi ekonomi yang terjadi di antara kedua negara tersebut, dan potensi Jepang bagi Korea Selatan.

Dalam BAB IV akan dijelaskan mengenai pandangan Korea Selatan yang akhirnya memutuskan untuk mengupayakan cara mempererat hubungan baik dengan Jepang. Kemudian akan dijelaskan mengenai strategi yang digunakan oleh Korea Selatan untuk menjadikan Jepang sebagai mitra dengan pendekatan diplomasi publik dan diplomasi *multi-track*, demi tercapainya tujuan untuk mempererat hubungan antara kedua negara.

BAB V mengenai bagian penutup yang akan berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini.